

# **FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :  
Siti Halimatus Sa'diyah

Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah  
Jember

## **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman pegawai pemerintah dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Jember. Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Penelitian mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi seperti pelatihan dan dukungan atasan dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Sampel pada penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh negatif terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan dukungan atasan berpengaruh positif terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Jember.

Kata kunci : *Keperilakuan organisasi, pelatihan, dukungan atasan, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah*

## **Abstract**

The background of this research is the lack of understanding of government employees in the implementation of regional financial accounting system in Jember District. Development system requires careful planning and implementation, to avoid any rejection of the developed system. A successful implementation of the system is not only determined on mere technical mastery, but also many studies show that the behavioral factors of individual users of the

system largely determine the success of implementation. Research on Organizational Behavior Factors in Implementation of Regional Financial Accounting System In Jember District. The purpose of this study is to determine the direct relationship of organizational behavior factors such as training and support of superiors in the implementation of regional financial accounting system. The sample of this research is taken from Civil Servant of Financial and Asset Management Division of Jember Regency. Based on the results of the hypothesis test stated that the training has a negative effect on the implementation of regional financial accounting system and support of superior has a positive effect on the implementation of financial accounting system in Jember District. Keywords: Organizational behavior, training, boss support, implementation of regional financial accounting system

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang harus diterima dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Lyna Latifah dan Arifin Sabeni 2007).

Pemerintah daerah Kabupaten Jember bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengimplementasikan penggunaan sistem informasi akuntansi terintegrasi. Perubahan menjadi sistem online membuat sistem pelaporan dan manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Jember bisa menjadi lebih cepat, sehingga ketika pimpinan ingin melihat laporan dapat langsung diakses dan memberikan informasi yang akurat. Namun dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah masih banyak pegawai pemerintah yang belum memahami cara mengoperasikan sistem tersebut, maka dari itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset perlu melakukan bimbingan teknis dimana para pegawai diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kehadiran sistem teknologi informasi telah banyak mengubah organisasi. Saat ini organisasi mulai

bergantung pada sistem teknologi informasi, suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi, walaupun pimpinan yang mengambil keputusan untuk mengadopsi suatu sistem teknologi informasi, tetapi keberhasilan penggunaan teknologi tersebut tergantung dari penerima dan penggunaan oleh individu-individu. Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari sistem teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dari pusat maupun daerah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja.

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari tingkah laku secara individu, kelompok dan tingkah laku ketika berorganisasi serta pengaruh perilaku individu terhadap kegiatan organisasi dimana mereka melakukan atau bergabung dalam organisasi tersebut. Perilaku organisasi juga merupakan suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi.

Aspek keperilakuan pada bidang akuntansi, baik dari pihak pelaksana dan penyusun laporan keuangan adalah seseorang atau kumpulan yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal hingga akhir terwujudnya laporan keuangan. Sehingga pihak pelaksana dan penyusunan memainkan peranan yang penting dalam menompong kegiatan atau operasi harian organisasi (Dwi Cahyono, 2012).

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem, pelatihan mempersiapkan pegawai

untuk mengambil tindakan tertentu yang digambarkan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja serta membantu dalam memperbaiki performansi pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya.

Dukungan atasan dalam melakukan pelatihan terhadap implementasi suatu sistem dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, dukungan atasan juga dapat diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Pelatihan dan dukungan atasan membantu individu-individu dalam penerimaan dan penggunaan sistem teknologi informasi. Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari sistem teknologi informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Setelah membaca uraian diatas, penelitian ini akan menguji hubungan faktor perilaku terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007, Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji hubungan faktor perilaku organisasional dalam meningkatkan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

### **Rumusan Masalah**

Rendahnya perilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

### **Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana cara meningkatkan perilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah ?

### **Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah faktor perilaku organisasi pelatihan mempunyai pengaruh dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?

2. Apakah faktor perilaku organisasi dukungan atasan mempunyai pengaruh dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
3. Apakah faktor perilaku organisasi pelatihan dan dukungan atasan mempunyai pengaruh dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi pelatihan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi dukungan atasan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui hubungan langsung faktor perilaku organisasi pelatihan dan dukungan atasan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Universitas. Hasil penelitian ini sebagai pembelajaran dan dapat menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi instansi terutama tentang akuntansi keperilakuan dan dapat menjadi bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas dalam mempertimbangkan pentingnya muatan mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dan Akuntansi Sektor Publik dalam Program Studi Akuntansi.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Faktor Keperilakuan Organisasi**

Perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditujukan oleh orang-orang dalam organisasi. Perilaku organisasi juga merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. (Robbins, 2011). Secara singkat Luthsan (2006) mengemukakan perilaku organisasi sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi.

Faktor Keperilakuan Organisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pelatihan

Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan penerapan SAKD yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dari SAKD. Menurut Fatimah (2013), untuk mencapai program pelatihan, maka harus memperhatikan sasaran yang jelas, memakai tolok ukur terhadap hasil yang dicapai. Pelatihan harus diberikan oleh tenaga pengajar yang kompeten, yang mampu menyampaikan ilmunya dengan baik, serta dapat memotivasi peserta pelatihan dengan baik. Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem, selain itu dapat dijelaskan pula bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan melatih yang bertujuan menyediakan sarana bagi pengguna/peserta untuk mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau khawatir dalam proses implementasi.

#### 2. Dukungan Atasan

Dukungan atasan merupakan dukungan dari atasan (Pemda) untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi SAKD, dan hubungannya dengan kemajuan dan efisiensi. Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan penyediaan sumber daya yang diperlukan, selain itu dapat diartikan juga sebagai bantuan yang

diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

### **Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah Daerah selaku pengelola dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Implementasi sistem akuntansi pemerintah memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip dasar dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah memuat ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam penyusunan laporan seperti pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan kepentingan lainnya yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan daerah seperti :

1. Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.



Kebijakan akuntansi ada pada tahapan kebijakan (*policy*). Tingkatan kebijakan (*policy*) berkaitan dengan masalah spesifik dalam penerapan standar yaitu misalnya:

1. Untuk Entitas mana standar diaplikasikan.
2. Transaksi, peristiwa atau kejadian yang mana, dalam area umum, yang harus dicakup oleh standar.
3. Haruskah informasi itu menjadi subjek untuk audit.
4. Sejak tanggal berapa standar harus diaplikasikan (termasuk pertimbangan masa transisi)

### **Akuntabilitas dan Transparansi**

Secara sederhana akuntabilitas (*accountability*) mengandung arti sebagai pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan manajemen pemerintah, Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) mendefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya (Mardiasmo, 2006).

Transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, laporan pertanggungjawaban merupakan hasil dari proses akuntansi dari transaksi pemerintah. Laporan pertanggungjawaban umum terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hubungan antara penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi ini dilakukan untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu seperti halnya pada Pemerintah Kota Jember yang menerapkan aturan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diterapkan oleh daerah lain di Indonesia. Studi deskriptif ini bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya. Penelitian ini pun termasuk dalam penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian ini dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari responden yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan faktor berperilaku terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner secara langsung kepada pegawai pemerintah dibidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jember.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas diperoleh pertanyaan yang digunakan sebagai indikator dalam kuisisioner sebanyak 27 pertanyaan yang telah diajukan. Hasil kuisisioner dari seluruh pertanyaan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik

(multikolinieritas, heteroskedastisitas dan normalitas), uji hipotesis (uji t dan uji F) dan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil pengujian hipotesis 1 ( $H_1$ ) yaitu variabel pelatihan ( $X_1$ ) terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (Y) dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan antara pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil analisis regresi memperoleh nilai koefisien  $\beta_1$  adalah sebesar 0,304 dengan nilai t sebesar 1,876 dan dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,070 > 0,05$  dan  $H_1$  ditolak. Artinya pelatihan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil ini disebabkan fenomena di lapangan, dimana intensitas pelatihan terkait dengan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang diadakan hanya satu tahun sekali. Selain itu, materi dalam pelatihan yang diadakan seperti materi *developer meeting* dan BIMTEK SIKD dan Implementasi SIKD menuju *E-Government* belum dapat diterima pegawai, sehingga belum mampu meningkatkan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan bahwa materi dalam pelatihan yang tidak cukup memadai belum dapat diterima pegawai dan belum mampu melaksanakan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Jember dengan baik sehingga pencapaian hasil belum maksimal atau belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan bergantinya regulasi atau undang-undang baru dimana pelatihan sebelumnya belum dikuasai sudah ditambah dengan pelatihan yang baru ini dan belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pengelola keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Artinya semakin rendah intensitas pelatihan, maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin berkurang. Sebaliknya semakin tinggi intensitas pelatihan, maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dan berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Latifah dan Sabeni (2007) dan Azlina Roza (2012) bahwa pelatihan tidak mempengaruhi implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian Shoffiyatuz Zahro (2012) bahwa pelatihan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis 2 ( $H_2$ ) yaitu dukungan atasan ( $X_2$ ) terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (Y) dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara dukungan atasan dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh dan signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil analisis regresi memperoleh nilai koefisien  $\beta_2$  adalah sebesar 0,303 dengan nilai t sebesar 2,496 dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $H_2$  diterima. Oleh karena itu dukungan atasan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Dukungan atasan memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem dan dengan adanya dukungan manajemen puncak berarti atasan terlibat secara langsung dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menentukan efektivitas sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan jika tidak adanya dukungan manajemen puncak maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana perusahaan dan dengan demikian tujuan instansi pemerintah tidak akan tercapai. Artinya semakin tinggi tingkat dukungan atasan, maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin meningkat. Sebaliknya semakin rendah tingkat dukungan atasan, maka implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin berkurang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Latifah dan Sabeni (2007) dan Azlina Roza (2012) yang membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap suksesnya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian Muji Mranani dan Beti Lestiorini (2011) yang membuktikan bahwa dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap suksesnya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dari analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari faktor keperilakuan organisasi yang di uji, hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Pengaruh pelatihan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah tidak berhasil dibuktikan. Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil variabel dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel pelatihan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel pelatihan diketahui nilai t hitung (1,876) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,070 > \alpha = 0,05$ . Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh bahwa  $F_{hitung}$  yaitu 26,483 dan nilai signifikansi =  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Sehingga variabel dukungan atasan, dan pelatihan mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) diperoleh hasil perhitungan untuk nilai  $R^2$  diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R<sup>2</sup>* sebesar 0,436. Hal ini berarti bahwa 43,6% variasi variabel sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel dukungan atasan, dan pelatihan, sedangkan sisanya yaitu 56,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

## **SARAN**

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih menekankan pada variabel pelatihan agar setiap anggota dapat lebih memahami sistem akuntansi sehingga dapat meningkatkan performansi kinerja pegawai melalui dengan pelatihan-pelatihan sistem supaya pegawai dapat menggunakan sarana teknologi khususnya sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terus memberikan baik dukungan atasan kepada bawahan berupa memberikan dukungan dan kepercayaan pada setiap keputusan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah serta menghargai pendapat. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, tidak terbatas pada faktor

perilaku tapi juga faktor teknis dalam rangka Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah perlu untuk diteliti. Perlu dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas, Kantor dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun diperluas untuk seluruh Dinas di Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. Perlu dilakukan pengembangan instrumen, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti. Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas dimasa yang akan datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan faktor berperilaku dalam kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Indonesia terutama yang berhubungan dengan perilaku dari pengguna. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah Daerah bahwa kesuksesan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana, namun faktor perilaku dari kegunaan atau pengguna juga perlu diperhatikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar. 2008. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Aceh**. Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Cahyono, Dwi. 2012. **Pengantar Akuntansi Keperilakuan**. Taman Kampus Pressindo. Jember.
- Fatimah. 2013. **Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak dan Kejelasan Tujuan terhadap Efektifitas Sistem Informasi Keuangan Daerah**. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Ghozali, Imam. 2013. **Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0**. Bagian Penerbit. Universitas Diponegoro. Semarang.

Hidayat, Heri. 2008. **Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way Kanan dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan**. Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

**Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.**

Karunia Sari Nur dan Pangesti. 2008. **Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD : Studi Kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang**. Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni. 2007. **Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)**. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanuddin 26-28 Juli. Makasar.

Luthsan, Fred. 2006. **Perilaku Organisasi**. Edisi 10 (Edisi Bahasa Indonesia). Andi. Yogyakarta.

Mahmudi. 2007. **Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. YKKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. **Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance**. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 1. Hal 1-17.

Mranani, Muji dan Beti Lestiorini. 2011. **Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif sebagai Intervening**. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol. 10 No. 3. Hal 193-203.

Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. **Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di**

**Subosukawonosraten.** *Simposium Nasional Akuntansi XIII.* Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.

**Pasal 283 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

**Pasal 308 dan Pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.**

**Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.**

Robbins, P Stephen dan Ajudge Timothy. 2011. **Perilaku Organisasi.** Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.

Roza, Azlina. 2012. **Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Survei pada Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar).** Skripsi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Bisnis.** Alfabeta. Bandung.

Zahro, Shoffiyatuz. 2012. **Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Instansi Pemerintah se-Kota Madiun).** Skripsi Prodi Akuntansi



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Surakarta.